



**PERAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PEMELIHARAAN SUMBER DATA
STRATEGIS CATATAN SIPIL SEBAGAI LANGKAH AWAL MEWUJUDKAN
DAYA KOMPETITIF DALAM MASYARAKAT ASEAN
(STUDI KASUS PEMELIHARAAN CATATAN SIPIL DI WILAYAH TANGERANG SELATAN)**

Oleh :

Siti Samsiyah, SS. M.Si

siti@ut.ac.id

Herwati Dwi Utami , Ir, S.IP, M.Hum

herwati@ut.ac.id

Yanti Hermawati, S.Sos. M.Si

herma@ut.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)

Universitas Terbuka

Abstrak

Tahun 2015 merupakan tonggak bersejarah bagi masyarakat ASEAN. Pada tahun ini seluruh masyarakat ASEAN memiliki kebebasan berintegrasi dengan negara manapun di wilayah ASEAN, untuk kepentingan perdagangan, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya. Untuk terlibat dalam masyarakat ASEAN tidaklah mudah, diperlukan kesiapan dari pemerintah pusat, dan daerah. Bagi pemerintahan daerah diperlukan kekokohan dari sisi hukum, perekonomian, maupun sumber daya manusianya. Dengan kesiapan pemerintahan daerah inilah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat ASEAN dapat mendatangkan kemanfaatan bagi rakyat Indonesia sendiri, namun jika pemerintah daerah tidak siap, maka tenaga kerja asing akan membanjir di seluruh sektor ketagakerjaan di Indonesia. Salah satu upaya yang mendasar yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melindungi data kependudukan di wilayahnya. Melalui data kependudukan atau catatan sipil ini akan teridentifikasi jumlah tenaga kerja produktif, tidak produktif lagi, jumlah kelahiran dan jumlah penduduk yang migrasi. Dengan data yang akurat maka pembinaan SDM yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan lebih optimal. Sebagai wilayah pemekaran baru dari kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan (Tangsel) perlu melakukan pembenahan di semua lini pemerintahannya. Salah satu unsur penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Tangsel adalah identifikasi jumlah penduduk dari hasil pemekaran daerah. Ditemukannya berbagai kasus pembangunan infrastruktur yang kurang tepat lokasinya, jumlah penduduk yang berbeda antara Badan Pusat Statistik (BPS) – Tangsel dan dinas pendudukan setempat merupakan hambatan dalam upaya mensejahterakan rakyat Tangsel. Penelitian *Peran Teknologi Informasi Untuk Pemeliharaan Sumber Data Strategis Catatan Sipil Sebagai Langkah Awal Mewujudkan Daya Kompetitif Dalam Masyarakat ASEAN (Studi Kasus Pemeliharaan Catatan Sipil di Wilayah Tangerang Selatan)* bertujuan mendeskripsikan kondisi catatan sipil di wilayah Tangsel pasca pemekaran serta peran teknologi

untuk pemeliharaan sumber data strategis kependudukan berupa catatan sipil. Penelitian kualitatif dengan pendekatan sistem ini melibatkan lima (5) kecamatan serta 2 (dua) kelurahan di wilayah Tangsel. Dari hasil interview dari informan, dokumen pendukung lain menunjukkan bahwa proses penyelesaiannya data kependudukan mempunyai rantai yang panjang, diperlukan 14 hari kerja bagi seseorang untuk menyelesaikan administrasi kependudukannya. Pemanfaatan teknologi informasi belum mampu meningkatkan/mempercepat proses administrasi kependudukan. Diperlukan komitmen dari seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan, kecamatan, dinas kependudukan untuk memanfaatkan teknologi guna mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan, termasuk pemeliharaan data strategis catatan sipil masyarakat Tangerang Selatan.

Kata Kunci : daya kompetitif Pemda, peran teknologi informasi, masyarakat ASEAN

PENDAHULUAN

Tahun 2015 merupakan lembaran baru bagi segenap masyarakat kawasan Asean, pada tahun ini semua negara di kawasan tersebut berada dalam satu komunitas pasar bebas. Ada tiga pilar yang dibangun dalam komunitas Asean, yaitu pilar politik dan keamanan, ekonomi serta social budaya. Dari ketiga pilar tersebut bertujuan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Asean serta terjaganya stabilitas regional di kawasan Asean. Untuk menjalankan kegiatan yang mengacu pada tiga pilar dibangunnya kawasan tunggal Asean perlu dipersiapkan masyarakat dengan segala sumber daya yang dimilikinya. Sumberdaya dari sisi kualitas tenaga kerja, sumberdaya alam, juga sumber daya teknologinya.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Asean umumnya serta khususnya bagi masyarakat Indonesia pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah perlu menyiapkan sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk menjadi bagian dari masyarakat tunggal Asean. Salah satu unsur yang sangat signifikan harus dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia adalah jumlah penduduk yang valid, akurat serta bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa jumlah penduduk yang akurat sulit bagi pemerintah daerah untuk maju, berkembang dalam komunitas Asean.

Salah satu komponen terpenting dalam mengidentifikasi jumlah penduduk dalam suatu daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Identifikasi jumlah penduduk melalui serangkaian kegiatan berupa sensus, survei dan registrasi penduduk akan menghasilkan data akhir yang tersimpan di dinas kependudukan, dan data tersebut setiap hari akan mengalami perubahan. Dari identifikasi jumlah penduduk yang dilakukan dari awal secara manual pada saat penghimpunan data terakhir secara menyeluruh dilakukan verifikasi data menggunakan perangkat teknologi untuk menjamin keakuratannya.

Tersajinya data kependudukan yang akurat merupakan sumber informasi penting dalam memutuskan setiap kebijakan daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Melalui data yang akurat setiap daerah akan mampu mengidentifikasi secara baik setiap kebutuhan di daerah, untuk keperluan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan di wilayahnya. Salah satu

wilayah yang telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memelihara data kependudukan atau catatan sipil meliputi peristiwa, kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan migrasi penduduk di suatu daerah adalah wilayah Tangerang Selatan. Sebagai daerah pemekaran baru dari kabupaten Tangerang sejak tahun 2008, Tangerang Selatan (Tangsel) berbenah di semua lini termasuk memperbaiki data kependudukannya. Bagaimanakah peran teknologi informasi dalam memelihara catatan sipil/data kependudukan di wilayah Tangerang Selatan ?

PEMBAHASAN

A. Masyarakat Asean

Terealisasinya masyarakat Asean di akhir 2015 ini diawali oleh KTT di Kuala Lumpur pada Desember 1997, memutuskan untuk mewujudkan Asean menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Asean memandang peluang yang bagus untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, karena dengan komunitas masyarakat Asean dari sisi ekonomi akan terjadi terbukanya pasar bebas Asean yang artinya setiap komoditi perdagangan sangat dimungkinkan diperdagangkan secara leluasa di wilayah Asean. Dari sisi tenaga kerja akan membuka peluang yang besar bagi tenaga kerja Indonesia untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan yang berada di lingkup Asean. Terwujudnya masyarakat Asean yang mampu mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia memerlukan kerja sama dari pemerintah, pengusaha serta dipersiapkannya infrastruktur yang baik secara fisik dan sosial.

Konsep *kerja sama* masyarakat Asean merupakan suatu sistem ekonomi yang terintegrasi di dalam kawasan dengan tujuan agar lebih maju dan efisien, berdaya saing tinggi dan terintegrasi dengan perekonomian dunia (<http://www.kemenperin.go.id>) makna dari konsep tersebut Indonesia harus siap dari semua lini untuk menghadapi masyarakat Asean, dengan penduduk 250 juta jiwa hamper 40% dari total jumlah penduduk di kawasan Asean jelas Indonesia memiliki potensi perekonomian yang besar, salah satunya dari sisi konsumsi masyarakatnya. Tak terkecuali peran teknologi sangat mendukung dalam kelancaran mewujudkan masyarakat Asean yang sejahtera.

B. Identifikasi Jumlah Penduduk yang Akurat Sebagai Komponen Utama Membangun Daerah

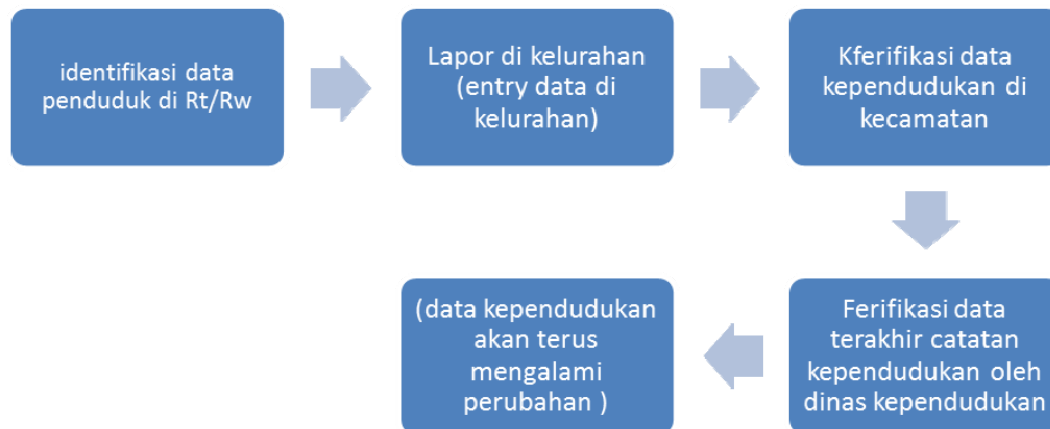
Identifikasi jumlah penduduk yang akurat merupakan unsur utama yang harus dimiliki setiap daerah, hal ini perlu karena dari data penduduk yang akurat inilah suatu daerah akan lebih tepat sasaran dalam menentukan kebijakan. Misalnya jumlah impor beras suatu daerah harus sesuai dengan jumlah penduduk yang memerlukan di daerah tersebut, jika jumlah penduduk tidak akurat yang terjadi adalah pemborosan anggaran daerah. Untuk menghindari program pengembangan daerah yang tidak tepat sasaran maka perlu diperbaharui data penduduk dikenal dengan istilah catatan sipil, meliputi data kelahiran, data perkawinan, data

perceraian, data kematian dan data migrasi penduduk dari luar daerah masuk ke daerah bersangkutan ataupun sebaliknya daerah dari dalam daerah berpindah ke luar daerah. Sebagai wilayah pemekaran baru Tangerang Selatan (Tangsel) telah melakukan pembenahan disemua lini termasuk pemharuan jumlah penduduk. Denga slogan Terwujudnya Pelayanan Terdepan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menuju penduduk Berkualitas (<http://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/web/web/pages/7/visi-dan-misi>) Pemda Tangsel mempublikasikan seperangkat UU No. 24 Thn 2013 tentang Administrasi kependudukan, yang mencakup tata cara pembuatan e-KTP, masa berlakunya, informasi mengenai data kependudukan yang diperoleh dari data awal oleh pemerintahan di tingkat kelurahan. Penerbitan akta kelahiran, pencatatan sipil, pengakuan serta pengesahan anak.

Berikut adalah cuplikan dari hasil wawancara dengan Kasie – pemerintahan di tingkat kelurahanannya tepatnya di wilayah kalurahan Pamulang Barat, Bp. Kosasih, menyatakan,

“catatan sipil di desa Pamulang Barat sudah sesuai prosedur. Artinya penduduk yang ada di wilayah Pamulang Barat ini terdata sesuai peraturan. Jika ada kelahiran, kematian, pindah penduduk atau jika terjadi perubahan kondisi penduduk melaporkan ke keluarhan dengan terlebih dahulu mendapat surat pengantar dari RT dan RW setempat. Namun, berhubung wilayah Tangsel ini merupakan daerah pemekaran masih banyak KK (Kartu Keluarga) dari warga Tangsel yang belum diupdate. Masih banyak yang identitas KK - nya kabupaten Tangerang, belum Tangerang Selatan “

Kondisi demikian perlu diperbaiki karena akan berakibat pada ketidakakuratan data kependudukan. Dengan tidak teridentifikasinya KK (Kartu Keluarga) yang riel di wilayah Tangsel dapat berakibat pada identifikasi jumlah penduduk yang tidak sesuai. Untuk mempercepat proses identifikasi data jumlah penduduk digunakan teknologi untuk melakukan entry data. Proses entry data dimulai dai pemerintahan di tingkat kelurahan, selanjutnya input/masukan data dari kelurahan akan tercover oleh sistem software dari Dinas kependudukan. Jika digambarkan prosedur aliran datanya sebagai berikut



Gambar 1 : Prosedur Entry data Kependudukan

Melihat fungsi –fungsi organisasi sesuai alur di atas maka entry data dilakukan di pemerintahan daerah tingkat kelurahan – pemerinthan kecamatan melakukan ferifikasi data dan updating/pembaharuan data terakhir dilakukan di dinas kependudukan. Sebagai model data yang terus bergulir secara otomatis, karena setiap individu akan mengaami siklus berupa kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian (jika terjadi) serta migrasi atau perpindahan penduduk maka data kependudukan ini setiap hari akan terus berubah sesuai perubahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Untuk wilayah Pamulang barat salah satu hambatan yang dialami pada saat melakukan entry data adalah lemahnya jaringan internet di daerah tersebut. Untuk menjaga keakuratannya selain data kependudukan diproses secara elektronik juga dilakukan pemrosesan seacara manual. Artinya pada saat di kelurahan setelah data kependudukan dientry oleh petugas kelurahan, selanjutnya data manual akan disimpan di kelurahan sesuai pengelompokannya. Dengan tujuan jika sewaktu-waktu diperlukan fisik data bersangkutan dapat diidentifikasi serta mudah untuk proses temu –kembali.

Mengenai desentralisasi data kependudukan di tingkat kelurahan ini sangat sesuai karena kelurahanlah tingkat paling depan untuk mengetahui kondisi penduduk secara riel. Bisa disebutkan bahwa kelurahan merupakan perpanjangan tangan dari dinas kependudukan.

Kasie kecamatan Pamulang barat , Sopeandi dalam wawancara menjelaskan,

“Validasi secara riel keadaan jumlah penduduk di kota tangsel-kecamatan pamulang barat –sudah dilakukan. Dan himbauan kami kepada seluruh kepala keluarga untuk segera memperbaiki KK –nya menjadi wilayah Tangsel telah dilakukan sejak th. 2012, namun hingga saat ini masih banyak warga yang belum melakukannya. Prosedurnya surat pengantar dari RT/RW, mengisi formulir dari kelurahan, selanjutnya dari kelurahan dikirim ke kecamatan untuk kita proses, terakhir di dinas kependudukan. Dari dinas kependudukan ini akan dikembalikan ke kecamatan lagi, diteruskan ke kelurahan dan pemohon pembaharuan data bisa mengambil KK baru ini di kelurahan setempat. Waktu

yang diperlukan saat pengajuan hingga selesai memerlukan waktu 14 hari kerja, demikian pula untuk dokumen lain seperti pengajuan KTP”

Perbaikan data kependudukan inilah yang penting untuk segera dilakukan. Mengingat jumlah penduduk yang akurat akan dapat membantu dalam menyelenggarakan pembangunan daerah yang berkualitas, sesuai sasaran dan sesuai perencanaan.

C. Pemanfaatan Teknologi Untuk Memperbaharui Catatan Sipil/ data kependudukan

Era teknologi saat ini telah dimanfaatkan oleh banyak pihak. Tak terkecuali oleh dinas kependudukan yang digunakan untuk mengidentifikasi catatan sipil. Pemanfaatan teknologi ini oleh Departemen Dalam Negeri juga telah dimanfaatkan untuk keperluan kependudukan. Hal ini dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri dengan cara menyebarluaskan aplikasi kependudukan di daerah-daerah di Indonesia. Namun demikian respon tiap daerah untuk memanfaatkan aplikasi penduduk ini tidaklah sama. Untuk mendapatkan data yang akurat selain system yang kredibel, pemanfaatan teknologi ini merupakan optimalisasi dari rekrutmen data yang ada di berbagai wilayah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Kuswandi, Riana, Husni Fahmi, Haret Faidah Herald Setiadi, Zainal Hasibuan) dengan judul Konsolidasi Database Kependudukan Nasional yang dipublikasikan pada Jurnal Sistem Informasi MTI-UI – (Vol. 3 – No. 1 – April 2007) menggarisbawahi bahwa dapat diperoleh data mengenai kependudukan secara nasional dari berbagai daerah di Indonesia secara komprehensif meskipun masing-masing daerah menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini memberikan jaminan bahwa Indonesia dapat memiliki catatan sipil yang akurat jika dilakukan pengintegrasian data dari daerah-daerah tersebut. Artinya setiap daerah harus mampu memiliki catatan sipil yang akurat.

Wilayah Tangsel telah menerapkan teknologi dalam pemrosesan data kependudukan, meskipun masih belum optimal namun teknologi ini telah membantu dalam proses percepatan keakuratan data kependudukan. Diperlukan waktu 14 hari untuk memproses data kependudukan merupakan waktu yang cukup lama, dengan kehadiran teknologi ini diharapkan proses data kependudukan dapat lebih cepat dan sistem desentralisasi kependudukan bisa diterapkan sehingga waktu yang diperlukan untuk memproses data kependudukan dapat lebih singkat.

D. Penutup

Kehadiran teknologi perlu dioptimalkan bagi tiap pemerintah daerah untuk memperbaiki data kependudukannya. Departemen dalam negeri telah menyiapkan dan menyebarluaskan program-program/software aplikasi kependudukan, untuk memproses data kependudukan, sehingga mempermudah setiap daerah dalam mengidentifikasi jumlah penduduk. Tangerang Selatan sebagai wilayah pemekaran baru telah menerapkan teknologi dalam pemrosesan pembaharuan data kependudukan, namun teknologi ini belum berperan secara optimal, hal ini terindikasi masih diperlukannya waktu yang cukup lama bagi seseorang untuk mengurus



identitas kependudukannya, selama 14 hari kerja. Melalui teknologi diharapkan waktu yang diperlukan bisa lebih singkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Pegangan Bidang Kependudukan. 1984. Jakarta : Lembaga Demografi FE UI.

Heer, David M. Kartasapoetra, R.G. 1985. *Masalah Kependudukan Negara Berkembang*. Jakarta: Bina Aksara
(Puspitasari, Laili Septaria, Mochamad Makmur, Abdul Wachid) Adminsitrasi

Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang dipublikasikan di Jurnal

Administrasi Publik (JAP), Vol 1 No.2, hal 231-237 (th 2013)

(Kuswandi, Riana , Husni Fahmi, Haret Faidah Herald Setiadi, Zainal Hasibuan) dengan judul Konsolidasi Database Kependudukan Nasional yang dipublikasikan pada Jurnal Sistem Informasi MTI-UI – (Vol. 3 – No. 1 – April 2007)

<http://www.wikipedia.com>